

BAB II

RELASI KERJASAMA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO- TIONGKOK DALAM PERJANJIAN INFRASTRUKTUR DAN PERTAMBANGAN

Bab ini membahas perihal relasi bilateral yang awalnya saling menguntungkan antara Republik Demokratik Kongo dengan Tiongkok yang bertujuan membangun kerjasama melalui perjanjian yang disebut *The Sicomines Agreement* dengan hasil Perusahaan patungan *Sino-Congolais Des Mines (Sicomines)*. Yang mana hal tersebut telah memberikan kesepakatan ekonomi kedua negara yaitu pertukaran hak eksplorasi mineral kobalt dimiliki oleh Tiongkok dengan investasi perbaikan infrastruktur di Republik Demokratik Kongo. Namun setelah satu dekade berlalu Republik Demokratik Kongo sadar akan ketimpangan keuntungan yang didapatkan sehingga mengupayakan perjanjian revisi *Sicomines* pihak Kongo mendapatkan keuntungan yang telah disepakati di awal.

2.1. Dinamika Kerjasama Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok

Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan negara dengan wilayah terluas kedua di Afrika setelah Aljazair. Dalam sejarahnya, wilayah ini pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Raja Belgia, Leopold II, pada periode 1885-1908, ketika dikenal sebagai Negara Bebas Kongo, dan selanjutnya menjadi koloni Kerajaan Belgia dari tahun 1908 hingga memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960. Belgia menarik diri dari Republik Demokratik Kongo akibat gerakan

nasionalis semakin kuat, yang dipimpin oleh Patrice Lumumba, terus mendesak kemerdekaan. Negara ini dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari berlian, emas, dan minyak, hingga tembaga, kobalt, uranium, koltan, serta berbagai mineral lainnya. Selain itu, Republik Demokratik Kongo juga menjadi rumah bagi hutan hujan terbesar kedua di dunia.³⁹ Kekayaan alam dan mineral Republik Demokratik Kongo penting bagi perekonomian Belgia dan menjadi motif utama ekspansi kolonial Belgia kepada Kongo. Sehingga kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, padahal potensi sumber daya ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Setelah Merdeka Republik Demokratik Kongo tetap menjalin kerjasama dengan Belgia, lalu Amerika Serikat, dan selanjutnya bekerjasama dengan Tiongkok secara resmi sejak 1972. Setelah tahun 1972 hingga terjadinya pemilihan umum pertama di Kongo, Tiongkok menjadi investor ekonomi utama yang berpandangan netral dalam masalah politik. Pada tahun 1973, Presiden Mobutu melakukan kunjungan ke Beijing dan bertemu Ketua Mao Zedong. Dalam kunjungan tersebut, diperoleh janji bantuan teknis sebesar US\$ 100 juta untuk proyek kerjasama Tiongkok-Zaire. Selama masa pemerintahan Mobutu, praktik korupsi dan buruknya pengelolaan ekonomi terus berlangsung, yang berdampak pada kemunduran pembangunan dan rusaknya infrastruktur nasional. Kondisi ini

³⁹ Desta, "China, The US, and The DRC: Capitalism's Role in Exploitations," 2020, https://www.scribd.com/document/886049491/China-and-Congo#:~:text=exploitation,from Macau*%2C resulting in the.

mendorong Republik Demokratik Kongo terjebak dalam ketidakstabilan dan konflik berkepanjangan.

Memasuki akhir kekuasaan Mobutu, negara ini mulai diguncang perang saudara, yang diawali oleh Perang Kongo Pertama (1996-1997) dengan tujuan utama menjatuhkan rezim Mobutu. Saat, memasuki awal 1990-an, situasi politik dalam negeri Zaire semakin tidak stabil, sehingga hubungan dengan Tiongkok mengalami perlambatan. Perubahan besar terjadi pada 1996-1997, ketika Aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo-Zaire (AFDL) yang dipimpin oleh Laurent-Désiré Kabila berhasil menggulingkan rezim Mobutu dan mengganti nama negara menjadi Republik Demokratik Kongo (RDK).⁴⁰ Konflik tersebut kemudian berlanjut ke Perang Kongo Kedua (1998-2003), yang memicu konflik lanjutan, seperti konflik Kivu (2004-2013) yang melahirkan pemberontakan M23 (2012-2013).

Bagi pemerintah RDK, investasi, bantuan, dan proyek pembangunan yang ditawarkan Tiongkok menjadi peluang penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang selama ini tertinggal akibat konflik berkepanjangan. Berbeda dengan negara-negara barat maupun lembaga keuangan internasional yang cenderung memberikan syarat politik seperti tuntutan demokratisasi, penegakan HAM, atau tata kelola pemerintahan yang bersih, Tiongkok hadir dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berprinsip saling menguntungkan tanpa campur tangan terhadap urusan domestik. Pendekatan inilah

⁴⁰ Philippe Tunamsifu Shirambere, "The Democratic Republic Of The Congo-China 'S Deals On Construction Of Roads In Exchange Of Mines" 33, no. 2 (2020), hlm. 84.

yang kemudian mendorong hubungan RDK-Tiongkok semakin erat dan menjadikan Tiongkok sebagai mitra yang dianggap lebih sesuai dengan kepentingan nasional Kongo.⁴¹

Sejak Agustus 1998, di tengah berlanjutnya konflik bersenjata yang melibatkan dukungan dari Uganda dan Rwanda, Tiongkok memilih strategi masuk secara bertahap di Republik Demokratik Kongo.⁴² Alih-alih terlibat langsung dalam skala besar, Tiongkok mengandalkan para pedagang Tiongkok secara individual untuk membeli tembaga dan kobalt langsung dari penambang artisanal di Provinsi Katanga, wilayah yang dikenal kaya akan sumber daya mineral. Dengan ketidakstabilan pemerintahan yang dialami RDK, Tiongkok memberikan bantuan berupa rumah sakit dengan peralatan modern di pinggiran timur ibukota Kinshasa, selain itu Tiongkok berinvestasi di bidang pertanian, dan stadion sepak bola nasional.⁴³

Bantuan investasi yang datang dari Tiongkok bukanlah semata-mata tanpa alasan, kekayaan sumber daya alam Republik Demokratik Kongo membuatnya berada dalam daftar negara-negara Afrika yang dituju oleh Tiongkok. Republik Demokratik Kongo termasuk negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia, terutama sebagai pemilik cadangan kobalt terbesar.⁴⁴ Bagi RDK, Tiongkok dianggap sebagai mitra strategis untuk memulihkan kembali infrastruktur di

⁴¹ Shivangi Basu, "China and the Democratic Republic of the Congo: A Progressively Deepening Bilateral Partnership," 2022, <https://thegeopolitics.com/china-and-the-democratic-republic-of-the-congo-a-progressively-deepening-bilateral-partnership>.

⁴² Shirambere, *loc. cit.*

⁴³ OCHA, "China Hands over Hospital to DR Congo," 2006, <https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/china-hands-over-hospital-dr-congo>.

⁴⁴ Elviati and Prakasita, "Pelanggaran HAM Dalam Kerjasama Eksploitasi Mineral Dan Pemerintah Kongo (Human Rights Violation in the Mining Exploration Cooperation between Chinese Consortium Companies and the Government of Democratic Republic of Congo)."

neagara tersebut. Ketertarikan Republik Demokratik Kongo untuk memperkuat hubungan kerja sama dengan Tiongkok merupakan keputusan yang dapat dipahami secara rasional, terutama setelah pengalaman panjang dengan intervensi negara-negara Barat dinilai tidak efektif dan bahkan merugikan.

Setelah berkuasa, Laurent-Désiré Kabila kembali menghidupkan hubungan dengan Tiongkok, ditandai dengan penandatanganan perjanjian perdagangan dan langkah simbolis mengirim putranya, Joseph Kabila, ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan militer tingkat lanjut di Beijing. Setelah Laurent-Désiré Kabila dibunuh pada Januari 2001, Joseph Kabila mengambil alih kepemimpinan dan memperkuat hubungan politik dengan Tiongkok, terutama karena terbatasnya dukungan internasional yang diterima Kongo saat itu. Menghadapi beban utang luar negeri yang besar dan dampak konflik bersenjata berkepanjangan terhadap pembangunan dan infrastruktur, Joseph Kabila memilih kerja sama dengan Tiongkok sebagai alternatif yang dianggap tidak mengancam kedaulatan dan memberikan ruang bagi pembangunan infrastruktur, sehingga hubungan bilateral kedua negara tetap terjaga selama masa pemerintahannya.

Pemerintahan Joseph Kabila (2001-2019) mengadopsi model pembangunan “*la Modernité*” yang terinspirasi dari keberhasilan transformasi ekonomi Tiongkok, yang dianggap sebagai hasil dari agenda modernisasi yang kuat dan konsisten.⁴⁵ Kekaguman tersebut juga semakin menguat karena meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pola kerja sama pembangunan ala Barat, yang oleh

⁴⁵ Claude Kabemba, “China-Democratic Republic of Congo Relations: From a Beneficial to a Developmental Cooperation,” *African Studies Quarterly* 16, no. 3–4 (2016), hlm. 74.

banyak negara Afrika dipersepsikan sebagai bentuk neo-kolonialisme dan praktik eksploitatif yang tidak memberikan keuntungan nyata. Sejak memenangkan pemilu pada tahun 2006, Presiden Joseph Kabila berupaya menunjukkan capaian nyata dalam proses rekonstruksi nasional setelah Kongo dilanda konflik selama hampir dua dekade.⁴⁶ Pemilu DRC tahun 2006 menandai berakhirnya masa transisi setelah perang saudara 1996-1997 dan 1998-2003.

Tiongkok mulai memainkan peran yang lebih aktif di RDK setelah pemilu tahun 2006 melalui perjanjian Sicomines. Hal ini disebabkan pada tahun 2007, Presiden Republik Demokratik Kongo Joseph Kabila, berupaya mencari pendanaan guna merealisasikan program kampanye tahun 2006 yang dikenal dengan *les cinq chantiers* atau “lima proyek pembangunan utama”.⁴⁷ Program tersebut berfokus pada lima sektor prioritas, yaitu infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penyediaan air dan listrik, serta perumahan dan ketenagakerjaan. Sebelum tahun 2006, keterlibatan Tiongkok di Republik Demokratik Kongo berupa pembangunan stadion, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya, pemberian jalur kredit kecil, beasiswa bagi mahasiswa Kongo, serta pengiriman tenaga medis.⁴⁸

Namun setelah tahun 2006 hingga seterusnya investasi Tiongkok di Republik Demokratik Kongo terus mengalami perkembangan. Dari tahun 2007-2009 pada masa pemerintahan Joseph Kabila, Tiongkok dan Kongo mendiskusikan *The Sicomines Agreement* (kerjasama Sicomines). Perjanjian Sicomines merupakan

⁴⁶ Paul Nantulya, “*Stability in the Democratic Republic of the Congo beyond the Elections*,” 2018, <https://africacenter.org/spotlight/stability-in-the-democratic-republic-of-the-congo-beyond-the-elections/>.

⁴⁷ Jansson, “*The Sicomines Agreement Revisited : Prudent Chinese Banks and Risk- Taking Chinese Companies*.” 2013, hlm. 152.

⁴⁸ Kabemba, *op. cit.*, hlm. 77.

kesepakatan kerja sama antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok yang ditandatangani pada tahun 2008-2009, dengan skema utama “sumber daya alam ditukar dengan pembangunan infrastruktur” (*resources-for-infrastructure*). Kerja sama Sicominex pada awalnya diinisiasi oleh pemerintah Republik Demokratik Kongo di bawah Presiden Joseph Kabila sebagai upaya mencari pembiayaan infrastruktur alternatif, sebelum kemudian diformalkan melalui kesepakatan dengan Tiongkok. Kerjasama ini menghasilkan satu perusahaan patungan yang dinamakan *Sino-Congolais Des Mines*, dimana Tiongkok memberikan bantuan infrastruktur sebanyak US\$ 6 berupa jalan, sekolah, rumah sakit, bendungan, dan pertambangan. Tiongkok juga mendapatkan konsesi pertambangan sejumlah 600.000 ton kobalt. Pada tahun 2010-2019, Tiongkok memberikan bantuan militer dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian kepada RDK. Pasukan itu juga terdiri dari 43 petugas medis yang bertugas merawat korban luka, evakuasi medis, dan pencegahan epidemi.⁴⁹

Selanjutnya pada masa pemerintahan Felix Tshisekedi (2019-Sekarang), terjadi upaya revisi perjanjian *Sicominex*. Upaya revisi ini disebabkan Kongo yang telah menyadari bahwa telah terjadi ketimpangan dalam perjanjian *Sicominex*, Tiongkok telah mendapatkan keuntungan besar dalam pertambangan yang mana Tiongkok mengendalikan hampir 80% tahap pemurnian.⁵⁰ Sedangkan bagi RDK, perbaikan infrastruktur yang telah dijanjikan belum terlihat. Melihat upaya tersebut, pada tahun 2021 Tiongkok memberikan bantuan penghapusan hutang sebesar US\$

⁴⁹ Rhany Chairunissa Rufinaldo, “Pasukan Penjaga Perdamaian China Bertolak Ke Kongo,” 2019, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pasukan-penjaga-perdamaian-china-bertolak-ke-kongo/1586886>.

⁵⁰ Zahra Khan, “Congo’s Cobalt Conundrum,” *Chemistry World*, 2025, <https://www.chemistryworld.com/news/congos-cobalt-conundrum/4021696.article?>

28 juta dan akan memberikan dana pendukung terkait proyek infrastruktur jika RDK bersedia bergabung di proyek BRI. Dengan demikian, sumber daya mineral Kongo menjadi daya tarik besar bagi Tiongkok yang pada saat bersamaan berupaya memastikan kepastian dan keamanan pasokan bagi kebutuhan industrinya.

2.2. Investasi Tiongkok di Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratik Kongo (RDK) dikenal memiliki cadangan kobalt, koltan, tembaga, emas, dan litium berkualitas tinggi yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Mineral-mineral strategis ini merupakan komoditas penting yang sangat dibutuhkan dalam mendukung proses transisi energi global. Perkembangan negara Republik Demokratik Kongo dari awal kemerdekaan hingga saat ini tidak luput dari bantuan finansial dari Tiongkok. Tiongkok merupakan salah satu dari banyak investor asing yang tertarik masuk ke Republik Demokratik Kongo, terutama karena biaya penambangan yang relatif rendah serta melimpahnya endapan bijih bermutu tinggi, seperti kobalt dan tembaga. Dalam konteks ini, sektor pertambangan menjadi fokus utama keterlibatan Tiongkok di negara tersebut.

Dari masa pemerintahan Presiden Joseph Kabila (2001-2019) hingga pemerintahan Presiden Felix Tshisekedi (2019-sekarang), Tiongkok melakukan kerjasama untuk mengamankan pasokan kobalt nya melalui perjanjian *Sino-Congolais Des Mines* menghasilkan perusahaan patungan *Sicomines* yang pemurniannya digunakan untuk memproduksi ponsel dan kendaraan Listrik. Kobalt yang merupakan produk sampingan dari penambangan tembaga, merupakan komponen penting dalam baterai lithium-ion yang digunakan pada ponsel pintar. Sekitar seperempat dari total produksi kobalt dunia diserap untuk kebutuhan

perangkat tersebut. Selain itu, baterai berbasis kobalt juga menjadi bagian utama dalam kendaraan listrik, yang sering dipromosikan sebagai transportasi “ramah lingkungan” dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.⁵¹

Penting untuk ditegaskan bahwa keterlibatan perusahaan multinasional Tiongkok di Republik Demokratik Kongo tidak berhenti pada kegiatan ekstraksi mineral yang kemudian langsung diekspor dalam bentuk bijih mentah. Sejak pertengahan tahun 2000-an, seiring liberalisasi sektor pertambangan, pemerintah RDK justru mewajibkan setiap proyek pertambangan baru untuk melakukan pengolahan terhadap bijih dan konsentrat di dalam negeri sebelum diekspor, melalui perubahan kode pertambangan serta pembatasan ekspor bijih mentah.⁵² Kebijakan ini mendorong perusahaan-perusahaan tambang, termasuk yang dikuasai modal Tiongkok, untuk membangun fasilitas pengolahan (pabrik hidrometalurgi/*smelter*) di kawasan tambang tembaga-kobalt Katanga dan Lualaba.

Fasilitas-fasilitas tersebut mengubah bijih tembaga-kobalt menjadi *cobalt hydroxide* atau hidroksida kobalt kasar, yaitu produk antara (*intermediate product*) dengan kadar logam yang lebih tinggi dan bobot yang lebih ringkas untuk diangkut dibandingkan bijih mentah.⁵³ Sekitar 80% pabrik pengolahan mineral di Provinsi Katanga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asal Tiongkok, sehingga tahap

⁵¹ Kafarhire, “China’s Investment in the Democratic Republic of Congo: The Impact of the 2007 Sino-Congolese Agreement in a Postwar Period.”

⁵² A L Gulley, “One Hundred Years of Cobalt Production in the Democratic Republic of the Congo,” *Resources Policy* 79 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103007>.

⁵³ African Mineral Development centre, “Cobalt,” 2026, <https://www.africangreenminerals.com/minerals/cobalt>.

pengolahan awal di dalam negeri Kongo ini pun secara praktis berada di bawah kendali Tiongkok.⁵⁴

Meskipun demikian, tahap pengolahan yang berlangsung di RDK tersebut hanya merupakan pengolahan awal (*midstream processing*), bukan pemurnian akhir (*refining*) yang menghasilkan bahan baku siap pakai bagi industri baterai. Hidroksida kobalt yang dihasilkan di Katanga selanjutnya diekspor ke Tiongkok untuk menjalani proses pemurnian lanjutan menjadi *cobalt sulfate* atau logam kobalt dengan kemurnian tinggi (*battery grade*), yang baru kemudian dapat digunakan sebagai bahan baku katode baterai lithium-ion. Tiongkok diperkirakan menguasai sekitar 70-80% kapasitas pemurnian kobalt dunia, sehingga hampir seluruh tahap bernilai tambah tertinggi dalam rantai pasok kobalt, mulai dari pemurnian hingga produksi sel baterai dan kendaraan listrik, terkonsentrasi di wilayah Tiongkok, bukan di Kongo.⁵⁵ Kebutuhan Tiongkok akan kobalt yang berada di Republik Demokratik Kongo terlihat dalam impor kobalt yang dilakukan Tiongkok dari tahun 2007 hingga tahun 2023. Berikut tabel impor kobalt Tiongkok dari Republik Demokratik Kongo:

Tabel 2. 1 Impor Kobalt Tiongkok dari Republik Demokratik Kongo

Tahun	Total Impor Kobalt dari seluruh dunia (ton)	Impor kobalt Tiongkok dari RDK (ton)	Persentase
2007	118.099 ton	85.871 ton	72,71%
2008	254.333 ton	206.025 ton	81,01%
2009	282.955 ton	241.299 ton	85,28%
2010	349.460 ton	320.885 ton	91,82%

⁵⁴ Zahra Khan, "Congo's Cobalt Conundrum." Chemistry World, 2025, <https://www.chemistryworld.com/news/congos-cobalt-conundrum/4021696.article>

⁵⁵ Laura Kupe, "The DR Congo's Cobalt Power Move," New America, 2025, <https://www.newamerica.org/insights/the-dr-congos-cobalt-power-move/>.

2011	348.024 ton	322.767 ton	92,74%
2012	176.070 ton	168.874 ton	95,91%
2013	179.397 ton	175.590 ton	97,88%
2014	190.806 ton	188.599 ton	98,84%
2015	227.584 ton	224.636 ton	98,70%
2016	41.285,1 ton	37.405 ton	90,60%
2017	100.986 ton	100.120 ton	99,14%
2018	136.098 ton	134.553 ton	98,86%
2019	90.890,7 ton	86.703 ton	95,39%
2020	53.697,8 ton	53.697 ton	100,00%
2021	19.080,6 ton	19.018 ton	99,67%
2022	26.272,3 ton	26.253 ton	99,93%
2023	16.776,9 ton	16.587 ton	98,87%

Pada tahun 2007 Tiongkok mengimpor kobalt sejumlah 85.871 ton dengan persentase 72.71% dari total impor kobalt.⁵⁶ Jumlah impor kobalt terbesar pada tahun 2011 mencapai 322.767 ton dan pada tahun 2023 mengimpor sejumlah 16.587 ton kobalt dari Kongo dan 98,87% impor berasal dari Kongo.⁵⁷ Bagi Tiongkok, kerjasama dengan Kongo merupakan bagian penting untuk keberlangsungan industrinya. Harga dari kobalt sendiri pada tahun 2018 mengalami kenaikan hingga mencapai titik tertinggi sejumlah US\$100.000 per ton. Namun, akibat pandemi Covid-19 harga kobalt terus turun menjadi sekitar \$30.000/ton pada tahun 2024.

Di Republik Demokratik Kongo, pengaruh Tiongkok dalam sektor kobalt terus menguat, bahkan hingga menimbulkan kekhawatiran bahwa Tiongkok dapat memegang peranan besar dalam mengendalikan perdagangan kobalt global.

⁵⁶ World Integrated Trade Solution (WITS), “Cobalt Ores and Concentrates Imports from Congo, Dem. Rep. in 2007.”

⁵⁷ World Integrated Trade Solution (WITS), “Cobalt Ores and Concentrates Imports from Congo, Dem. Rep. in 2023,” 2023, <https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ZAR/product/260500>.

Meskipun secara global Tiongkok hanya memiliki sekitar 1% cadangan kobalt dunia, perusahaan-perusahaan asal Tiongkok justru menguasai sebagian besar operasi penambangan kobalt di Kongo. Pada tahun 2020, 8 dari 14 tambang kobalt terbesar di Republik Demokratik Kongo berada di bawah kendali perusahaan Tiongkok, yang secara bersama-sama menyumbang sekitar setengah dari total produksi kobalt nasional. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang didukung oleh modal Tiongkok memiliki atau memegang saham di 15 dari 19 tambang penghasil kobalt di negara tersebut, menunjukkan besarnya dominasi Tiongkok dalam rantai pasok kobalt Kongo.⁵⁸

Pada tahun 2023, Republik Demokratik Kongo diperkirakan memiliki sekitar 6 juta ton cadangan kobalt yang merupakan jumlah terbesar di dunia. Kondisi ini menjadikan RDK produsen kobalt utama secara global, dengan kontribusi lebih dari 75% terhadap total produksi kobalt dunia. Selain jumlahnya yang besar, kobalt yang berasal dari Kongo juga dikenal memiliki kualitas yang tinggi, dengan kadar kobalt umumnya berada pada kisaran 0,3% hingga 0,5%, sehingga secara keseluruhan lebih unggul dibandingkan sumber kobalt dari wilayah lain.⁵⁹ Tiongkok cenderung menjaga tingkat impor kobalt pada level yang relatif stabil, mengingat ketersediaan sumber daya kobalt di dalam negeri sangat terbatas. Produksi domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga Tiongkok akan terus bergantung pada impor bahan baku kobalt, dengan Republik Demokratik Kongo menjadi pemasok utama untuk memenuhi permintaan tersebut.

⁵⁸ Suleyman O. Altiparmak et al., *“Cornering the Market with Foreign Direct Investments: China’s Cobalt Politics,”* 2025.

⁵⁹ SMM New Energy, *“China Cobalt Market Report,”* 2024.

Seiring meningkatnya permintaan global terhadap ponsel pintar dan kendaraan listrik, kebutuhan Tiongkok akan kobalt sebagai bahan baku utama baterai lithium-ion juga terus bertambah. Pada tahun 2023, penjualan kendaraan listrik di tingkat global mencapai sekitar 9,5 juta unit, dengan Tiongkok sebagai produsen dan pasar terbesar. Di saat yang sama, merek-merek ponsel asal Tiongkok juga mendominasi pasar dunia dengan pangsa sekitar 30% pada tahun 2023, yang semakin memperkuat ketergantungan industri teknologi Tiongkok terhadap pasokan kobalt yang stabil dan berkelanjutan.⁶⁰ Untuk mengamankan kebutuhan tersebut, Tiongkok tidak hanya bergantung pada impor, tetapi juga menanamkan kepemilikan saham dan memperluas pengaruhnya di negara-negara penghasil kobalt utama dunia, yakni Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Papua Nugini. Hingga tahun 2024, Republik Demokratik Kongo menempati posisi paling strategis sebagai pemasok kobalt terbesar dengan kontribusi sekitar 67,9%, disusul oleh Indonesia sebesar 16,3%, dan Papua Nugini sebesar 1,2%.⁶¹

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa kobalt menempati posisi strategis dalam mendukung kepentingan industri dan teknologi Tiongkok, khususnya pada sektor kendaraan listrik dan elektronik konsumen. Tingginya permintaan global terhadap kedua produk tersebut mendorong Tiongkok untuk mengamankan pasokan kobalt melalui kepemilikan saham dan penguasaan rantai pasok di negara-negara penghasil utama, terutama Republik Demokratik Kongo.

⁶⁰ Adi Ahdiat, “*Penjualan Mobil Listrik Global Naik Pada 2023, Tembus Rekor Baru,*” 2024, <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/00532d36b725460/penjualan-mobil-listrik-global-naik-pada-2023-tembus-rekor-baru>.

⁶¹ Venditti, “*China’s Cobalt Supply Dominance by 2030,*” 2024, <https://www.visualcapitalist.com/chinas-cobalt-supply-dominance-by-2030/>

Ketergantungan Tiongkok terhadap kobalt Kongo, di satu sisi, memperkuat posisi Kongo sebagai pemasok utama, namun di sisi lain menempatkan Kongo dalam relasi yang tidak seimbang, karena nilai tambah dan kendali teknologi masih didominasi oleh pihak Tiongkok.

2.3. Kesepakatan Perjanjian *Sicomines* Tahun 2007-2009

Kesepakatan mineral untuk pembangunan infrastruktur yang disepakati pada tahun 2007 antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok menjadi salah satu contoh paling menonjol dari ekspansi pengaruh ekonomi Tiongkok di Afrika. Melalui skema barter tersebut, dibentuk perusahaan patungan pertambangan bernama *Sino-Congolais des Mines (Sicomines)*, yang memperoleh konsesi tambang di Provinsi Katanga yaitu wilayah dengan cadangan mineral yang sangat melimpah. Sebagai kompensasi atas akses penambangan tersebut, Tiongkok berkewajiban membangun infrastruktur transportasi dan fasilitas sosial di RDK, dengan pembiayaan berasal dari pinjaman Bank Ekspor-Import Tiongkok. Pelunasan pinjaman dilakukan melalui keuntungan dari operasi pertambangan tersebut. Meskipun sempat menuai penolakan dari aktor domestik maupun internasional pada tahun 2008-2009, kesepakatan ini kemudian direvisi dan ditandatangani kembali pada Oktober 2009, dan hingga kini masih dalam proses implementasi.⁶²

Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* pada 17 September 2007.⁶³ Di pihak Tiongkok, negosiasi

⁶² Jansson, "The *Sicomines* Agreement: Change and Continuity in the Democratic Republic of Congo's International Relations," no. 97 (2011).

⁶³ Andoni Maiza-Larrarte and Gloria Claudio-Quiroga, "The Impact of *Sicomines* on Development in the Democratic Republic of Congo," 2019, hlm. 5.

awal dipimpin oleh pemerintah Tiongkok dan *China Railway Engineering Company* (CREC), yang telah memiliki pengalaman operasional sebelumnya di lapangan. Perusahaan tersebut awalnya memperkirakan akan menjalankan proyek pertambangan konvensional lainnya, namun arah pembahasan berubah selama proses perundingan bilateral berlangsung. Pemerintah Kongo menegosiasikan adanya komponen pembangunan infrastruktur dalam kerja sama tersebut.

Melalui perjanjian ini, pemerintah Kongo berupaya memperoleh sumber pembiayaan bagi proyek-proyek infrastruktur yang sangat mendesak setelah periode konflik Panjang seperti jalan, rumah sakit, dan sekolah.⁶⁴ Kesepakatan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi mineral, yang selanjutnya berkontribusi pada kenaikan ekspor, penerimaan pajak, serta pemasukan devisa negara. Selain itu, proyek ini juga diproyeksikan menciptakan peluang kerja baru, baik di sektor pertambangan maupun konstruksi. Untuk mendukung pembiayaan proyek, *China Exim* (Ekspor-Import) Bank dilibatkan. Setelah itu, perusahaan *Sinohydro* turut diundang bergabung dalam perjanjian guna meminimalkan risiko dalam pelaksanaan proyek tersebut. Adapun perusahaan *Sinohydro* merupakan BUMN Tiongkok yang berspesialisasi dalam konstruksi pembangkit listrik tenaga air dan teknik sipil, dan merupakan merek utama di bawah naungan *Power Construction Corporation of China* (*Powerchina*).⁶⁵

⁶⁴ Utama, Rosyidin, and Wahyudi, "Di Balik Keterbelakangan Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt Dalam Kerjasama Pertambangan Kongo Dan Tiongkok Denta," 4, no. 1 (2022), 1-22.

⁶⁵ Sinohydro, "Sinohydro Company Profile," 2019, <http://www.sinohydro.com/About/CompanyProfile/index.html>.

Dari pihak Kongo, dua BUMN yaitu perusahaan tambang *Gécamines* dan perusahaan real estat *Simco* ditunjuk sebagai mitra resmi dalam proyek tersebut. Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada September 2007 kemudian menjadi dasar kesepakatan *resources for infrastructure* (RFI), di mana pihak Tiongkok memperoleh hak pengelolaan tambang di area Kolwezi milik *Gécamines*, sebagai imbalan atas pembangunan berbagai infrastruktur transportasi dan fasilitas sosial di Kongo. Selanjutnya, pada Desember 2007, dibentuk perusahaan patungan bernama *Sino Congolaise des Mines (Sicomines)* untuk mengelola dan mengeksekusi ketentuan perjanjian. Dalam struktur kepemilikan, perusahaan Tiongkok memegang saham mayoritas sebesar 68%, sementara mitra Kongo menguasai 32% sisanya, konsesi pertambangan kobalt 202.290 ton, dan investasi total senilai US\$ 9 miliar dengan jumlah US\$ 6 miliar untuk infrastruktur dan US\$ 3 miliar untuk pertambangan. Keuntungan *Sicomines* akan digunakan untuk mengganti biaya investasi dalam proyek infrastruktur paling mendesak di Republik Demokratik Kongo. Sehingga parlemen Republik Demokratik Kongo setuju untuk membebaskan *Sicomines* dari semua pajak.⁶⁶

Perjanjian utama antara Kementerian Infrastruktur dan Pekerjaan Umum Republik Demokratik Kongo, CREC, dan Sinohydro ditandatangani pada 22 April 2008. Dalam perjanjian yang sudah direvisi tersebut, muncul beberapa ketentuan baru yang lebih menguntungkan pihak Tiongkok. Misalnya, area tambang yang diberikan kepada perusahaan Tiongkok diperluas yang tadinya 202.290 ton kobalt

⁶⁶ Maiza-Larrarte and Claudio-Quiroga, *loc. cit.*

pada awal perjanjian, menjadi 626.619 ton kobalt.⁶⁷ Lalu, dan proyek hanya akan dijalankan jika studi kelayakan menunjukkan tingkat keuntungan minimal 19%. Selain itu, terdapat tambahan jaminan dari pemerintah Kongo atas dana pinjaman. Dengan kata lain, jika Sicominer tidak mampu melunasi seluruh biaya investasi dan bunganya dalam waktu 25 tahun, maka pemerintah Kongo harus menanggung sisa pembayaran tersebut.

Revisi ketiga dan terakhir ditandatangani pada Oktober 2009. Dalam perubahan tersebut, investasi total menjadi US\$ 6 miliar, pembangunan infrastruktur dengan nilai maksimal US\$ 3 miliar digunakan untuk pembangunan 5000 perumahan sosial, 3.735 km rel kereta, 31 Rumah Sakit modern, 145 pusat kesehatan, 2 bendungan hidroelektrik (Katende dan Kakobola), 2 universitas modern, 2 bandara (Goma dan Bukavu), serta pembangunan jalan 3.656 km, dan suku bunga pinjaman dari China Exim Bank diturunkan dari 6,6% menjadi 4,4%. Perubahan yang paling penting adalah pembatasan jaminan pemerintah Kongo hanya pada proyek infrastruktur. Sementara itu, biaya investasi pertambangan senilai US\$ 3 miliar yang dilakukan pihak Tiongkok hanya dapat diganti melalui pendapatan yang dihasilkan langsung dari kegiatan pertambangan tersebut.⁶⁸

Tabel 2. 2 Hasil Perjanjian Sicominer Tahun 2007-2009

Tahun	Hasil Perjanjian Sicominer
September 2007	RDK (<i>Gecominer</i>): 32% Tiongkok (CREC & <i>Sinohydro</i>): 68% Konsesi pertambangan kobalt: 202.290 ton Jumlah investasi infrastruktur: US\$ 6 miliar Jumlah investasi pertambangan: US\$ 3 miliar

⁶⁷ Johanna Jansson, "Recipient Government Control under Pressure : The DRC , the IMF , China and the Sicominer Negotiations," no. June (2011): 1–16.

⁶⁸ Jansson, *op. cit.*, hlm. 155.

April 2008	Pertambahan konsesi kobalt menjadi 626.619 ton
Oktober 2009	Jumlah investasi infrastruktur: US\$ 3 miliar Jumlah investasi pertambangan: US\$ 3 miliar Pengurangan suku bunga pinjaman dari China Exim Bank menjadi 4,4%

Pada negosiasi yang dilaksanakan Republik Demokratik Kongo dengan Tiongkok tahun 2007-2009, didapatkan kesepakatan dua arah. Tahun 2007 terjadi pembagian saham pertambangan RDK 32% dan Tiongkok 68%, konsesi pertambangan kobalt yang didapatkan Tiongkok sebesar 202.290 ton, serta investasi total sebesar US\$ 9 miliar. Negosiasi dalam perjanjian *Sicomines* ini berlanjut di tahun 2008 dengan penambahan konsesi kobalt bagi Tiongkok menjadi 626.619 ton. Hingga negosiasi yang terakhir di tahun 2009, hasil final yaitu investasi total US\$ 6 miliar dengan pembagian investasi US\$ 3 miliar untuk infrastruktur dan US\$ 3 miliar untuk pertambangan, pengurangan suku bunga pinjaman dari *China Exim Bank* dari 6,6% menjadi 4,4%, serta pembagian saham dan konsesi kobalt tetap berjumlah sama dengan perjanjian sebelumnya.

Dari kesepakatan terakhir ini, perjanjian *Sicomines* berjalan dari tahun 2009 hingga saat ini. Namun, dalam kurun waktu 2009-2021 Republik Demokratik Kongo menyadari bahwa belum ada perbaikan infrastruktur yang dijanjikan, sedangkan Tiongkok telah mendapatkan eksplorasi mineral kobalt sesuai porsi yang dijanjikan. Sehingga pada masa pemerintahan Presiden Felix Tshisekedi (2019-sekarang), Republik Demokratik Kongo mengupayakan revisi perjanjian *Sicomines* agar dapat memperoleh perbaikan infrastruktur yang telah disepakati pada masa pemerintahan Joseph Kabila.

2.3.1. Revisi Perjanjian *Sicomines* Pada Masa Presiden Felix Tshisekedi

Sejak renegotiasi pada tahun 2009, *Sicomines* pada awalnya berjalan sesuai rencana dan pihak Tiongkok telah mencairkan dana pinjaman infrastruktur hingga batas maksimum yang diperbolehkan dalam perjanjian. Direncanakan pembangunan lebih dari 3.500 km jalan raya, sejumlah jalur kereta api baru, serta peningkatan infrastruktur transportasi di wilayah Kinshasa. Selain itu, proyek ini mencakup pembangunan 31 rumah sakit dengan kapasitas masing-masing 150 tempat tidur dan 145 pusat layanan kesehatan. Tidak hanya itu, sekitar 2.000 unit hunian di ibu kota dan 3.000 unit di berbagai provinsi, serta dua kampus universitas modern, turut menjadi bagian dari agenda infrastruktur yang sedang dikembangkan.⁶⁹

Namun, realisasi di lapangan jauh lebih rumit. Meskipun proyek infrastruktur telah dilaksanakan sejak 2008, pelaksanaan perjanjian kemudian terhenti hingga akhir 2012 karena *Sicomines* mengalami hambatan dalam akses pembiayaan.⁷⁰ *China Exim Bank* sempat menarik diri sebagai penyedia keuangan *Sicomines* pada awal 2012 karena ingin mengambil alih 32% saham *Gecamines* setelah memberikan pinjaman sekitar US\$ 1 miliar kepada *Sicomines*. Akibatnya, tidak ada proyek infrastruktur baru yang dilanjutkan dan kegiatan pertambangan di Katanga sama sekali belum mulai beroperasi hingga Desember 2012. Disisi lain pada tahun 2010, sekitar 80% pabrik pengolahan mineral di Provinsi Katanga telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asal Tiongkok.

⁶⁹ Stanis Bujakera Tshiamala, "DRC – China: Tshisekedi to Revisit Working Relationship with Beijing," 2021, <https://www.theafricareport.com/127957/drc-china-tshisekedi-to-revisit-working-relationship-with-beijing/>.

⁷⁰ Jansson, *loc. cit.*

Dari tahun 2012 hingga tahun 2023, pengembangan infrastruktur yang terjadi hanya pembangunan jalan Bitumed sepanjang 536 km dari yang seharusnya 3.656 km. Sedangkan sejumlah pembangunan infrastruktur yang dijanjikan yaitu 5000 perumahan sosial, 3.735 km rel kereta, 31 Rumah Sakit modern, 145 pusat kesehatan, 2 bendungan hidroelektrik (Katende dan Kakobola), 2 universitas modern, serta 2 bandara (Goma dan Bukavu).⁷¹ Untuk kegiatan operasi pertambangan mulai berjalan secara efektif pada tahun 2014.

Secara umum, aktivitas pertambangan menunjukkan kinerja yang relatif stabil, ditandai dengan produksi kobalt Republik Demokratik Kongo yang melampaui 100.000 metrik ton per tahun pada 2018, serta produksi tembaga yang melebihi satu juta metrik ton per tahun. Selanjutnya, sekitar 90% mineral yang diekstraksi dari wilayah pertambangan Katanga diekspor ke Tiongkok, yang pada tahun 2018 tercatat sebagai mitra dagang utama negara tersebut dengan kontribusi sekitar 26% terhadap total ekspor nasional.⁷²

Pada akhir tahun 2021, sebuah konsorsium internasional yang melibatkan 19 kelompok media merilis laporan berbasis ribuan dokumen keuangan bocor yang mengungkap praktik korupsi besar-besaran selama masa pemerintahan Presiden Joseph Kabila. Laporan tersebut menunjukkan bahwa *BGFI Bank* (bank swasta di RDK) diduga menjadi perantara bagi Kabila dan keluarganya untuk mengalihkan

⁷¹ Inspection générale des finances (IGF), “*Sicomines/Contrat Chinois: Minerais Congolais Contre Infrastructures*,” 2023, <https://x.com/IgfRdc/status/1631562908600549376?s=20>.

⁷² Carl-Johan Karlsson, “*The Chinese Power Grab: Tracking the Complicated Evolution of Sino-Congolese Relations*,” mining.com, 2019, <https://www.mining.com/web/the-chinese-power-grab-tracking-the-complicated-evolution-of-sino-congolese-relations/>

lebih dari US\$ 125 juta.⁷³ Temuan ini juga menyoroti kesepakatan tertutup antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dan pemerintahan Kabila, khususnya terkait proyek Sicominex, yang mana pada 2016 *Sicomines* dilaporkan membayar USD 25 juta kepada *Congo Construction Company* (CCC) perusahaan yang terkait dengan Kabila, yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada Kabila, lingkarannya, dan perusahaan-perusahaan Tiongkok lain.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, Tiongkok memperoleh hak atas sekitar 10 juta metrik ton tembaga dan 600.000 metrik ton kobalt dengan nilai ekonomi yang diperkirakan mencapai US\$ 50 miliar untuk jangka waktu 25 tahun. Namun, pandemi global COVID-19 berdampak pada penurunan sementara tingkat produksi, sehingga produksi kobalt pada tahun 2020 sedikit menurun hingga berada di bawah 100.000 metrik ton per tahun.⁷⁵ Dengan demikian, meskipun pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa perjanjian *Sicomines* merupakan bentuk “kerja sama yang saling menguntungkan”, dalam praktiknya manfaat yang diperoleh Tiongkok terbukti jauh lebih besar dibandingkan dengan Republik Demokratik Kongo.

Selain itu, konsorsium Tiongkok membentuk usaha patungan dengan *Gécamines* untuk proyek pembangkit listrik, namun sebagian “saham negara” dialihkan ke perusahaan yang dekat dengan rezim Kabila, sementara dana proyek diduga dialihkan dari tujuan awalnya. Rangkaian transaksi ini berlanjut, termasuk

⁷³ William Clowes and Michael Kavanagh, “Document Leak Shows Kabila Family, Associates Looted DRC Funds,” 2021, <https://www.aljazeera.com/economy/2021/11/19/document-leak-shows-kabila-family-associates-looted-drc-funds>.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Halim Nazar, “Chinese Mining in the DRC: From Sicomines to Global Cobalt Monopoly,” ICS Research Blog, 2021, <https://icsin.org/blogs/2021/08/27/chinese-mining-in-the-drc-from-sicomines-to-global-cobalt-monopoly/>.

penjualan CCC beserta izin tambang fosfatnya kepada *China Molybdenum* senilai USD 40 juta, yang diikuti arus dana berkelanjutan ke pihak-pihak terkait Kabila. Laporan yang sama juga mengungkap bahwa perjanjian *Sicomines* diam-diam diubah pada 2017.⁷⁶ Perubahan ini menghapus ketentuan bahwa seluruh pendapatan *Sicomines* digunakan untuk pembangunan infrastruktur RDK, dan menggantinya dengan pengalihan 35% pendapatan kepada pemegang saham Tiongkok. Minimnya realisasi Pembangunan seperti rumah sakit dan jalan memperbesar kritik publik dan mendorong Presiden Félix Tshisekedi berjanji meninjau ulang berbagai kesepakatan pertambangan yang dibuat pada era Kabila.⁷⁷

Lebih lanjut pada 15 Februari 2023, Badan Inspeksi Umum Keuangan Kongo (IGF) menerbitkan laporan audit yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, realisasi dana yang benar-benar digunakan untuk pengembangan investasi hanya mencapai sekitar US\$ 822 juta, jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan komitmen pendanaan sebesar US\$ 3 miliar sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Selain itu keuntungan yang dihasilkan dari *Sicomines* mulai tahun 2008 hingga tahun 2022 sejumlah US\$ 11,6 miliar, dengan jumlah keuntungan yang diperoleh Perusahaan Tiongkok US\$ 9,6 miliar, bank EXIM Tiongkok US\$ 1,2 miliar, dan keuntungan Republik Demokratik Kongo hanya mencapai US\$ 0,8 miliar atau setara US\$ 800 juta dalam infrastruktur.⁷⁸

⁷⁶ Patrick Anderson, “Cobalt and Corruption: The Influence of Multinational Firms and Foreign States on the Democratic Republic of the Congo” 14, no. 1 (2023).

⁷⁷ Aaron Ross and Helen Reid, “Congo’s \$6 Bln China Mining Deal ‘Unconscionable’, Says Draft Report,” 2021, <https://www.reuters.com/business/congos-6-bln-china-mining-deal-unconscionable-says-draft-report-2021-10-08/>.

⁷⁸ *Sicomines*, “*Sicomines S.A. 2024*,” 2024, <https://x.com/SICOMINES/status/1751185378545979541?s=20>

Walaupun perjanjian Sicomines memiliki beberapa aspek positif, pemerintah Republik Demokratik Kongo menilai bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintahan sebelumnya mengandung kelemahan mendasar dan belum menghasilkan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, renegotiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam usaha patungan Sicomines menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Felix Tshisekedi, mengingat hingga kini hanya sebagian kecil dari proyek yang dijanjikan Tiongkok yang benar-benar terealisasi di Republik Demokratik Kongo.

Setelah menjabat sebagai Presiden pada Januari 2019, Felix Tshisekedi mengindikasikan adanya menegosiasikan ulang perjanjian infrastruktur dan pertambangan antara Republik Demokratik Kongo dengan Tiongkok. Dan Pada tahun 2021, Presiden menyatakan komitmennya untuk melakukan renegotiasi terhadap perjanjian *Sicomines*, dengan menegaskan bahwa revisi perjanjian tersebut dilakukan atas nama rakyat Kongo yang pada saat itu masih berada dalam kondisi penderitaan dan kesulitan sosial-ekonomi.⁷⁹

Dalam kunjungan resmi pertamanya ke Tiongkok pada Mei 2023, Presiden Tshisekedi menyampaikan keinginan untuk meninjau kembali perjanjian *Sicomines* agar manfaat yang diperoleh lebih berpihak pada kepentingan Republik Demokratik Kongo. Bagi pihak Kongo, renegotiasi tersebut diarahkan pada peningkatan porsi kepemilikan saham nasional dalam *Sicomines* dari 32% menjadi 70%, sekaligus

⁷⁹ Tricontinental, “*The Congolese Fight For Their Own Wealth*,” 2024, https://thetricontinental-org.translate.google.com/dossier-77-the-congolese-fight-for-their-own-wealth/?_X_Tr_Sl=En&_X_Tr_Tl=Id&_X_Tr_Hl=Id&_X_Tr_Pto=Tc.

mengurangi kepemilikan saham Tiongkok dari 68% menjadi 30%, sehingga posisi Kongo dalam kerja sama tersebut menjadi lebih kuat dan seimbang.⁸⁰

Presiden Felix Tshisekedi juga mengusulkan penambahan jumlah investasi, dimana pada kesepakatan awal menjanjikan US\$ 3 miliar untuk royek infrastruktur menjadi US\$ 6,2 miliar. Penambahan jumlah investasi ini didasari oleh sedikitnya keuntungan yang diperoleh Republik Demokratik Kongo yang menjadi produsen kobalt. Namun demikian, kunjungan tersebut pada akhirnya tidak menghasilkan perubahan, karena ia belum berhasil memperoleh kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi Republik Demokratik Kongo dalam perjanjian Sicomines.⁸¹

Setelah kunjungan tersebut, perjanjian Sicomines relatif tidak mengalami perubahan hingga 20 Desember 2023 karena adanya pemilu. Setelah Felix Tshisekedi terpilih kembali menjadi presiden, pada Januari 2024 kontrak baru akhirnya ditandatangani. Kontrak tersebut berisikan investasi infrastruktur ditingkatkan menjadi US\$ 7 miliar dari US\$ 3 miliar yang diutamakan untuk pembangunan jalan nasional, perusahaan patungan *Sicomines* diharuskan membayar royalty 1,2% dari omzet tahunannya kepada pihak Kongo (*Gecamines*), RDK akan memegang 40% saham di pembangkit listrik tenaga air Busanga yang dibangun untuk menyediakan energi tambang tembaga-kobalt, dan perusahaan tambang milik negara Kongo (*Gécamines*) bertanggung jawab atas pemasaran 32%

⁸⁰ Zeenat Hansrod, "Long Road for DRC as It Renegotiates Minerals Deal with China," RFI, AFRICA, 2023, <https://www.rfi.fr/en/africa/20230812-long-road-for-drc-as-it-renegotiates-minerals-deal-with-china>.

⁸¹ Indo Pacific Defence Forum, "Draf Laporan Mengungkapkan Kesepakatan Penambangan Tiongkok Senilai 84,6 Triliun Rupiah (6 Miliar Dolar A.S.) Di Republik Demokratik Kongo 'Tidak Wajar,'" 2021, <https://ipdefenseforum.com/id/2021/10/draf-laporan-mengungkapkan-kesepakatan-penambangan-tiongkok-senilai-846-triliun-rupiah-6-miliar-dolar-a-s-di-republik-demokratik-kongo-tidak-wajar/>.

dari total produksi tahunan Sicomines. Namun untuk pembagian saham tidak memiliki perubahan, tetap pada kesepakatan kepemilikan saham Tiongkok 68% dan Republik Demokratik Kongo 32%.⁸²

Namun kesepakatan terbaru dalam perjanjian Sicomines menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur kini sangat bergantung pada kondisi harga tembaga di pasar global. Kedua pihak sepakat untuk menyediakan dana infrastruktur sebesar US\$ 324 juta per tahun selama periode 2024-2040, namun komitmen ini hanya dapat dijalankan apabila harga tembaga berada pada atau di atas US\$ 8.000 per ton.⁸³ Ketentuan tersebut membuat pendanaan infrastruktur menjadi tidak sepenuhnya pasti, karena apabila harga tembaga tidak memenuhi batas yang ditetapkan, rencana pembangunan sekitar 1.500 km jalan berpotensi mengalami penundaan.

Di sisi lain, kesepakatan ini juga membuka peluang tambahan manfaat bagi Republik Demokratik Kongo apabila kondisi pasar menguntungkan. Jika harga tembaga meningkat secara signifikan, yakni sedikitnya 50%, maka porsi keuntungan yang dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur akan dinaikkan sebesar 30%. Namun, apabila harga tembaga justru turun hingga berada di bawah US\$ 7.000 per ton, kedua pihak akan kembali negosiasi untuk menentukan ulang besaran anggaran infrastruktur tahunan.⁸⁴ Dengan demikian, kesepakatan ini

⁸² Sicomines, “Sicomines S.A. 2024,” 2024, <https://x.com/SICOMINES/status/1751185378545979541?s=20>

⁸³ Bruno Nsaka, “DRC: Risks and Challenges of Implementing the Renegotiated Chinese Contract between the Government and the GEC,” actualite.cd, 2024, <https://actualite.cd/index.php/2024/06/07/rdc-risques-et-defis-de-la-mise-en-application-du-contrat-chinois-renegocie-entre-le>.

⁸⁴ *Ibid.*

menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur dalam kerangka Sicomines sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga tembaga, sehingga manfaat yang diterima Kongo bersifat dinamis dan tidak selalu terjamin.

2.4. Situasi Ekonomi Politik Republik Demokratik Kongo

2.4.1. Konflik Politik Republik Demokratik Kongo

A. Krisis politik setelah memperoleh kemerdekaan (1960-1965)

Kongo Belgia memperoleh kemerdekaannya pada 30 Juni 1960 dan kemudian berganti nama menjadi Republik Kongo. Dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada Mei 1960, Gerakan Nasional Kongolai yang dipimpin oleh Patrice Lumumba berhasil memenangkan kursi parlemen. Hasil tersebut mengantarkan Lumumba menjabat sebagai perdana menteri, sementara Joseph Kasa-Vubu terpilih sebagai presiden. Namun, tidak lama setelah kemerdekaan, terjadi pemberontakan Force Publique serta upaya pemisahan diri di Katanga dan Kasai Selatan yang memicu krisis politik. Dalam situasi tersebut, Lumumba meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Dewan Keamanan kemudian mengirimkan sekitar 10.000 pasukan untuk memulihkan stabilitas.⁸⁵ Ketika Lumumba mendesak agar PBB menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi gerakan separatis di Katanga, Sekretaris Jenderal Dag Hammarskjöld menolak permintaan tersebut.

Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak memberikan bantuan untuk mengatasi gerakan separatis, Lumumba kemudian mencari dukungan dari Uni

⁸⁵ The History Learning Site, “*The United Nations and the Congo*,” 2015, https://www.historylearningsite.co.uk/modern-world-history-1918-to-1980/the-united-nations/the-united-nations-and-the-congo/#goog_rewarded.

Soviet yang selanjutnya mengirimkan bantuan logistik serta penasihat militer. Pada 23 Agustus 1960, angkatan bersenjata Kongo melaksanakan operasi militer di wilayah Kasai Selatan. Situasi ini memperburuk ketegangan politik, hingga pada 5 September 1960 Presiden Joseph Kasa-Vubu memberhentikan Lumumba dengan tuduhan bertanggung jawab atas kekerasan di Kasai Selatan serta melibatkan Soviet dalam urusan domestik Kongo. Lumumba menolak keputusan tersebut dan menyatakan tindakan Kasa-Vubu inkonstitusional, sehingga krisis politik antara keduanya semakin memuncak.⁸⁶

Pada 14 September 1960, Kolonel Joseph Mobutu, dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Belgia, mengambil alih kekuasaan dan menyingkirkan Lumumba dari jabatannya. Selanjutnya, pada 17 Januari 1961, Lumumba diserahkan kepada otoritas Katanga dan kemudian dieksekusi oleh pasukan yang berada di bawah kepemimpinan Belgia.⁸⁷ Ironisnya, sebelumnya Lumumba sendiri yang mengangkat Mobutu sebagai kepala staf Angkatan Bersenjata Nasional Kongo (*Armée Nationale Congolaise*). Dengan memanfaatkan krisis kepemimpinan antara Kasa-Vubu dan Tshombe, Mobutu berhasil memperoleh dukungan militer yang cukup untuk mengkonsolidasikan kekuasaan melalui kudeta. Setelah dilaksanakannya referendum konstitusi menjelang kudeta tahun 1965, nama negara diubah menjadi Republik Demokratik Kongo, dan pada tahun 1971 kembali diubah oleh Mobutu menjadi Republik Zaire.

⁸⁶ Democracy Now, "Patrice Lumumba: 50 Years Later, Remembering the U.S.-Backed Assassination of Congo's First Democratically Elected Leader," 2011, https://www.democracynow.org/2011/1/21/patrice_lumumba_50_years_later_remembering.

⁸⁷ Antonia van de Velde, "Belgians Accused of War Crimes in Killing of Congo Leader Lumumba," 2010, <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/belgians-accused-of-war-crimes-in-killing-of-congo-leader-lumumba-2007587.html>.

B. Krisis tata kelola di era Mobutu (1965-1997)

Mobutu memperoleh dukungan kuat dari Amerika Serikat karena sikapnya yang anti-komunis, yang dinilai mampu menahan penyebaran pengaruh komunisme di kawasan Afrika. Ia kemudian membentuk sistem partai tunggal dan menetapkan dirinya sebagai kepala negara melalui pemilu yang hanya diikuti oleh dirinya sebagai kandidat tunggal. Meskipun pemerintahannya sempat menciptakan stabilitas relatif, rezim Mobutu juga ditandai oleh berbagai pelanggaran hak asasi manusia, represi politik, kultus individu, serta praktik korupsi yang meluas. Sejak akhir 1960-an, Mobutu secara sistematis menyingkirkan lawan-lawan politiknya melalui kooptasi, penangkapan, maupun pelemahan posisi, serta melakukan rotasi pejabat secara berkelanjutan untuk mempertahankan kontrol kekuasaan. Meninggalnya Joseph Kasa-Vubu pada tahun 1969 semakin memperkuat dominasi kekuasaannya.⁸⁸

Korupsi pada masa pemerintahan Mobutu menjadi begitu umum hingga muncul istilah *le mal Zairois* yang merujuk pada praktik korupsi, pencurian, dan salah urus secara masif. Bantuan internasional, terutama dalam bentuk pinjaman, lebih banyak memperkaya elite rezim sementara infrastruktur nasional mengalami kemunduran signifikan, menjadikan Zaire sebagai kleptokrasi. Sepanjang 1970-1980-an, Mobutu tetap mendapat dukungan Barat dan beberapa kali bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, namun setelah runtuhnya Uni Soviet, posisinya melemah karena tak lagi dipandang sebagai sekutu strategis Perang Dingin.⁸⁹

⁸⁸Adam Hochschild, "Rape of the Congo," 2009, <https://www.nybooks.com/articles/2009/08/13/rape-of-the-congo/>.

⁸⁹andré Mbata Mangu, "The 2006 Constitution Of The Democratic Republic Of Congo," 2006, 6–7.

Meningkatnya tuntutan reformasi mendorong Mobutu mendeklarasikan Republik Ketiga pada 1990, meskipun reformasi yang dijanjikan sebagian besar bersifat simbolik.

Kekuasaan Mobutu berakhir pada Mei 1997 setelah ia digulingkan melalui pemberontakan yang dipimpin oleh Laurent-Désiré Kabila, sekaligus mengakhiri 32 tahun masa pemerintahannya. Pada 17 Mei 1997, Kabila kemudian memproklamasikan dirinya sebagai presiden dan menetapkan kembali nama negara menjadi Republik Demokratik Kongo (RDK). Ia juga mengeluarkan dekrit yang memusatkan kekuasaan eksekutif dan legislatif di bawah kendalinya.⁹⁰ Namun, ketegangan dengan Presiden Yoweri Museveni dari Uganda dan Paul Kagame dari Rwanda yang sebelumnya berperan dalam mendukung kenaikannya kepada kekuasaan memicu pemberontakan besar terhadap rezimnya pada 1998.

C. Perang antar negara Afrika (1996-2007)

Pada 1996, setelah genosida Rwanda dan naiknya pemerintahan Tutsi, milisi Hutu Rwanda (Interahamwe) melarikan diri ke wilayah timur Zaire dan menggunakan kamp pengungsi sebagai basis serangan terhadap Rwanda, sekaligus bekerja sama dengan angkatan bersenjata Zaire untuk menyerang kelompok Tutsi Kongo. Situasi ini mendorong Rwanda dan Uganda membentuk koalisi militer yang menyerbu Zaire dan memulai Perang Kongo Pertama dengan dukungan kelompok oposisi yang dipimpin Laurent-Désiré Kabila melalui Aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo (AFDL).⁹¹ Pada 1997, Mobutu melarikan diri, Kabila

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ James Astill, "Rwandans Wage War of Plunder," 2002, <https://www.theguardian.com/GWeekly/Story/0,3939,770542,00.html>.

mengambil alih kekuasaan, dan nama negara kembali diubah menjadi Republik Demokratik Kongo.

Ketegangan kembali meningkat ketika Kabila meminta pasukan asing keluar dari negaranya, yang memicu munculnya kelompok pemberontak baru yang didukung Rwanda dan Uganda, sehingga pecah Perang Kongo Kedua pada 1998. Konflik ini melibatkan beberapa negara Afrika, termasuk Angola, Zimbabwe, dan Namibia yang mendukung pemerintah Kongo. Setelah Kabila dibunuh pada 2001, putranya Joseph Kabila menggantikannya dan memulai proses perdamaian melalui negosiasi multilateral serta kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB (MONUC).⁹² Kesepakatan damai pada 2002-2003 menghasilkan pemerintahan transisi dan penarikan sebagian besar pasukan asing. Pemilu multipartai pertama sejak 1960 kemudian diselenggarakan pada 2006 dan dimenangkan oleh Joseph Kabila, meskipun sempat terjadi bentrokan politik sebelum akhirnya ia resmi dilantik sebagai presiden pada akhir tahun tersebut.

D. Konflik Kivu (2008-2024)

Laurent Nkunda, yang sebelumnya merupakan anggota *Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Goma* dan telah terintegrasi ke dalam militer nasional, kemudian membelot dan mendirikan kelompok pemberontak bernama Kongres Nasional untuk Pertahanan Rakyat (CNDP). Kelompok ini diduga memperoleh dukungan dari Rwanda dengan alasan untuk menghadapi milisi Hutu FDLR. Pada Maret 2009, melalui kesepakatan antara Republik Demokratik Kongo

⁹² The Guardian, "Revealed: How Africa's Dictator Died at the Hands of His Boy Soldiers," 2001, <https://www.theguardian.com/world/2001/feb/11/theobserver>.

dan Rwanda, pasukan Rwanda diizinkan memasuki wilayah Kongo untuk menangkap Nkunda serta memburu FDLR. Selanjutnya, CNDP menandatangani perjanjian damai dan sepakat bertransformasi menjadi partai politik, sementara pasukannya diintegrasikan ke dalam militer nasional.⁹³

Pada 2012, Bosco Ntaganda memimpin faksi yang memisahkan diri dan membentuk Gerakan 23 Maret (M23), dengan alasan pemerintah melanggar perjanjian sebelumnya. M23 sempat merebut kota Goma pada November 2012.⁹⁴ Rwanda kembali dituduh mendukung kelompok tersebut, meskipun dibantah. Pada 2013, Dewan Keamanan PBB membentuk Brigade Intervensi untuk menumpas kelompok bersenjata, dan M23 akhirnya menyatakan berakhirnya pemberontakan pada November 2013. Di wilayah lain, konflik juga terjadi di Katanga utara akibat aktivitas kelompok Mai-Mai yang lepas kendali, menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi. Di Ituri, bentrokan etnis antara kelompok Lendu dan Hema terus berlangsung, sementara di timur laut, Tentara Perlawanan Lord (LRA) pimpinan Joseph Kony memindahkan basisnya ke wilayah Kongo sejak 2005 dan beroperasi di sekitar Taman Nasional Garamba.

Konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo sering dianggap sebagai salah satu konflik paling mematikan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pada 8 Desember 2017, terjadi serangan pemberontak di Semuliki, wilayah Beni, yang mengakibatkan tewasnya 14 personel pasukan penjaga perdamaian PBB serta 5 tentara Kongo. Hasil penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian

⁹³ Melanie Gouby, "Congo-Kinshasa: General Ntaganda and Loyalists Desert Armed Forces," 2012, <https://allafrica.com/stories/201204040870.html>.

⁹⁴ Gabriel, "Goma: M23 Rebels Capture DR Congo City," 2012, <https://www.bbc.com/news/world-africa-20405739>.

memastikan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh kelompok Allied Democratic Forces (ADF).⁹⁵ Selama berlangsungnya konflik berkepanjangan tersebut, jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai antara 900.000 hingga 5,4 juta orang. Laporan pada tahun 2009 bahkan menyebutkan bahwa sekitar 45.000 orang meninggal setiap bulannya, yang sebagian besar disebabkan oleh penyakit dan kelaparan. Dari total korban tersebut, hampir setengahnya merupakan anak-anak berusia di bawah lima tahun.⁹⁶

Konflik ini juga ditandai oleh berbagai pelanggaran serius, seperti pembunuhan terhadap warga sipil, perusakan properti, serta kekerasan seksual yang terjadi secara luas. Sebuah studi memperkirakan bahwa lebih dari 400.000 perempuan menjadi korban pemerkosaan setiap tahunnya di Republik Demokratik Kongo, dan pada periode 2018-2019 negara ini dilaporkan memiliki tingkat kekerasan seksual tertinggi di dunia. Selain itu, berdasarkan laporan Human Rights Watch dan Kongo Research Group, tercatat lebih dari 1.900 warga sipil tewas dan sedikitnya 3.300 orang diculik di wilayah Kivu timur antara Juni 2017 hingga Juni 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan di kawasan tersebut masih terus berlangsung secara serius.⁹⁷

Pada tahun 2022, kelompok pemberontak M23 kembali aktif dan pada Juli 2023 berhasil menguasai sebagian besar wilayah Kivu Utara. Pemerintah di

⁹⁵ BBC News, "DR Congo: UN Peacekeepers Killed in Attack in North Kivu," 2017, <https://www.bbc.com/news/world-africa-42285871>.

⁹⁶ James Butty, "A New Study Finds Death Toll in Congo War Too High," 2010, <https://www.voanews.com/a/butty-congo-war-death-toll-questioned-21jan10-82223332/152921.html>.

⁹⁷ Eric Oteng, "1,900 Killed, over 3,300 Abducted in DR Congo's Eastern Kivu Provinces," 2024, <https://www.africanews.com/2019/08/15/1900-killed-over-3300-abducted-in-dr-congo-s-eastern-kivu-provinces/>.

Kinshasa, bersama sejumlah negara asing, berulang kali menuduh Rwanda memberikan dukungan finansial dan logistik terhadap kebangkitan M23. Sebaliknya, Rwanda menuding Kinshasa mendukung kelompok milisi Hutu ekstremis seperti FDLR. Di sisi lain, Rwanda tetap mempertahankan kehadiran militer yang cukup besar di wilayah timur RDK serta di sepanjang perbatasan kedua negara.⁹⁸ Selain faktor keamanan, baik Rwanda maupun Uganda termasuk kelompok milisi yang mereka dukung juga memiliki kepentingan ekonomi dalam aktivitas pertambangan di Kongo, meskipun tidak seluruhnya berlangsung secara legal.

Pada Oktober 2023, Utusan Khusus PBB untuk Kawasan Danau Besar, Xia Huang, memperingatkan bahwa eskalasi ketegangan antara kedua negara berpotensi memicu konflik militer terbuka. Ia menyoroti adanya peningkatan kekuatan militer di kedua pihak, minimnya dialog langsung di tingkat tinggi, serta maraknya ujaran kebencian. Menanggapi situasi tersebut, pada akhir November 2023 kedua negara menyepakati pakta yang dimediasi oleh Amerika Serikat, yang berisi komitmen untuk mengurangi kehadiran militer di wilayah perbatasan, menekan ujaran kebencian, dan tidak saling mencampuri sistem politik masing-masing.⁹⁹ Namun demikian, meskipun sempat disepakati gencatan senjata selama 72 jam menjelang pemilu nasional RDK, konflik bersenjata di wilayah timur Kongo tetap berlangsung hingga tahun 2024.

⁹⁸ Center of Preventive Action, “*Conflict in the Democratic Republic of Congo*,” 2026, <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-democratic-republic-congo>.

⁹⁹ *Ibid.*

Dari krisis politik serta konflik yang telah dipaparkan dalam paragraf sebelumnya, berikut ringkasan dalam tabel konflik politik di Republik Demokratik Kongo.

Tabel 2. 3 Konflik Politik di Republik Demokratik Kongo

Konflik	Tahun	Uraian runtutan konflik
Krisis politik pasca merdeka	1960-1965	Lumumba diangkat menjadi perdana Menteri dengan Joseph Kasa-Vubu menjadi Presiden, tidak lama pasca kemerdekaan terjadi pemberontakan di Katanga dan Kasai Selatan. Mobutu berusaha menggulingkan Lumumba dari jabatannya dan meng kudeta Presiden Kasa-Vubu di dukung oleh Belgia dan AS.
Krisis tata Kelola di era mobutu	1965-1997	Mobutu mengukuhkan dirinya sebagai presiden dengan dukungan kuat dari AS. Marak terjadi pelanggaran HAM, represi politik, pemujaan individu, serta korupsi besar-besaran yang menjadikan Kongo memiliki kemunduran signifikan dalam ekonomi, politik, dan teknologi. Mobutu digulingkan oleh Laurent Desire Kabila pada tahun 1997.
Perang antar negara Afrika	1996-2007	Rwanda dan Uganda membentuk koalisi militer untuk menyerang Kongo hingga Meletus perang Kongo pertama tahun 1997. Ketegangan meningkat saat Kabila meminta pasukan asing keluar dari Kongo sehingga Meletus perang Kongo kedua pada tahun 1998. Konflik ini melibatkan Angola, Zimbabwe, dan Namibia yang mendukung Kongo. Laurent Desire Kabila terbunuh tahun 2001 dan digantikan oleh putranya, Joseph Kabila.
Konflik Kivu	2008-2024	Tahun 2009 Kongo dan Rwanda sepakat bahwa Rwanda diizinkan masuk untuk mengakan Nkunda dan memburu FDLR. Pada tahun 2012 meletus gerakan M23 dengan alasan pemerintah Kongo melanggar perjanjian. Konflik juga terjadi akibat pemberonakan etnis yang lepas kendali. Pada tahun 2022 M23 aktif kembali dan menguasai sebagian besar wilayah Kivu

		Utara pada tahun 2023. Konflik bersenjata di wilayah timur Kongo masih berlangsung hingga tahun 2024.
--	--	---

Konflik di Republik Demokratik Kongo telah berlangsung secara Panjang dan berulang sejak masa awal kemerdekaan hingga periode terkini. Konflik dimulai dari krisis politik pasca kemerdekaan yang ditandai dengan perebutan kekuasaan antara tokoh-tokoh nasional, kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Mobutu yang diwarnai oleh krisis tata Kelola, praktik korupsi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Memasuki akhir 1990-an hingga awal 2000-an, konflik berkembang menjadi perang antar negara yang melibatkan beberapa negara di Kawasan Afrika. Selanjutnya, konflik bertransformasi menjadi konflik bersenjata berkepanjangan di wilayah Kivu yang dipicu oleh ketegangan etnis, kepentingan politik, serta perebutan sumbu daya alam, dan masih berlangsung hingga tahun 2024.

Serangkaian konflik yang terjadi secara terus-menerus tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, melemahnya perekonomian, serta meningkatnya kerentanan sosial Masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya membentuk situasi domestik yang tidak stabil dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi arah kebijakan Pembangunan serta hubungan kerja sama internasional Republik Demokratik Kongo.

2.4.2. Lemahnya Kapasitas Ekonomi dan Teknologi Kongo

Konflik yang berkepanjangan menyebabkan Republik Demokratik Kongo menghadapi keterbatasan serius dalam aspek ekonomi dan teknologi. Republik Demokratik Kongo (RDK) menghadapi tantangan infrastruktur yang sangat berat, bahkan termasuk yang paling kompleks di kawasan Afrika. Konflik berkepanjangan

menyebabkan banyak jaringan infrastruktur rusak parah atau dibiarkan mengalami penurunan kualitas tanpa perawatan yang memadai. Saat ini, sekitar setengah dari aset infrastruktur yang ada memerlukan rehabilitasi.¹⁰⁰ Bahkan sebelum periode konflik, keterbatasan infrastruktur dasar telah menyulitkan integrasi antar wilayah ekonomi dan pusat-pusat permukiman di negara tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pembangunan infrastruktur bukan hanya akibat perang, tetapi juga merupakan persoalan struktural yang telah lama menghambat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Aktivitas ekonomi Kongo masih bertumpu pada sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor bahan mentah. Pendapatan utama pemerintah Republik Demokratik Kongo bersumber dari aktivitas industri pertambangan, produksi minyak, dan bantuan finansial dari luar negeri. Meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pertumbuhan ekonomi Kongo terus terhambat oleh instabilitas politik, lemahnya infrastruktur, serta kapasitas pemerintahan yang terbatas. Sekitar 63% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, kondisi yang dipengaruhi oleh rendahnya upah, terbatasnya lapangan kerja formal, minimnya infrastruktur, dan akses yang kurang memadai terhadap layanan publik.¹⁰¹ Pada tahun 2023, Nilai Indeks Pembangunan Manusia Republik Demokratik Kongo

¹⁰⁰ Vivien Foster and Daniel Alberto Benitez, “*The Democratic Republic of Congo ’s Infrastructure : A Continental Perspective*,” no. March (2010).

¹⁰¹ Martin Mriti and Bret Tate, “*Report Name : Democratic Republic of Congo - Country Overview*,” 2025.

adalah 0,522 menempatkan RDK sebagai negara terbelakang ke-171 dari 193 negara dan wilayah.¹⁰²

Perkembangan produk domestik bruto (PDB) dalam US Dollar Kongo pada tahun 2007-2024 mengalami kenaikan yang cukup banyak, namun tetap tidak sepenuhnya stabil. Pada tahun 2007 PDB Republik Demokratik Kongo sejumlah 294,1 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan cukup banyak mencapai 649,4 (6,2%).¹⁰³ Sektor pertambangan Republik Demokratik Kongo (RDK) menjadi kontributor utama dengan menyumbang 70% terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2023. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut belum mampu secara signifikan menekan tingkat ketimpangan maupun kemiskinan yang masih meluas.

Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ekstraktif, ditambah dengan peningkatan utang publik serta defisit fiskal, menunjukkan urgensi dilakukannya reformasi struktural, khususnya dalam aspek tata kelola dan diversifikasi ekonomi. Hingga saat ini, RDK masih bergantung pada dukungan internasional, termasuk fasilitas kredit dari IMF sebesar 1,5 miliar dolar AS. Namun, upaya reformasi yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan disiplin fiskal kerap menghadapi hambatan dari kelompok elit yang memiliki kekuasaan. Walaupun PDB Kongo mengalami kenaikan signifikan, kesempatan kerja di RDK tetap masih terbatas.

Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal, lemahnya tata kelola pemerintahan, rapuhnya institusi publik, warisan konflik berkepanjangan, serta ketidakstabilan politik yang telah mengakar, diperparah oleh tingginya tingkat

¹⁰² UNDP, “Republik Demokratik Kongo,” 2023, <https://data.undp.org/countries-and-territories/COD>.

¹⁰³ World Bank Group, “GDP per Capita (Current US\$) - Congo, Dem. Rep.,” 2024, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2024&locations=CD&start=2007>.

penyebaran penyakit, menjadi faktor-faktor yang memperdalam krisis multidimensional di Republik Demokratik Kongo. Kondisi tersebut menyebabkan negara ini berada dalam situasi krisis yang berlangsung lama, ditandai oleh permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang serius.

Sektor swasta menjadi penopang utama mata pencaharian masyarakat karena peluang kerja formal masih sangat terbatas, sementara penduduk pedesaan menghadapi kemiskinan ekstrem akibat keterisolasian dari pasar dan layanan sosial. Di sisi lain, meskipun Kongo kaya akan kobalt dan tembaga serta memproduksi emas, berlian, timah, dan tantalum, industri ekstraktifnya terganggu oleh infrastruktur pascaperang yang buruk, tata kelola yang lemah, dan praktik penambangan ilegal. Keterbatasan tersebut mendorong Kongo untuk mengandalkan ekspor komoditas tambang sebagai sumber utama pendapatan, sementara kebutuhan barang konsumsi dan peralatan industri, termasuk mesin pertambangan, masih bergantung pada impor.¹⁰⁴ Kongo mengimpor teknologi dari berbagai negara yaitu Tiongkok, Afrika Selatan, Belgia, dan Zambia. Tiongkok menjadi mitra impor utama dalam memenuhi kebutuhan teknologi RDK.

Ketergantungan Republik Demokratik Kongo terhadap Tiongkok tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga struktural dan teknologis. Keterbatasan kapasitas industri domestik, minimnya fasilitas pemurnian mineral, serta lemahnya infrastruktur energi membuat Kongo tidak mampu melakukan hilirisasi sumber daya secara mandiri. Dalam situasi tersebut, Tiongkok hadir sebagai mitra yang menyediakan modal, teknologi, dan infrastruktur secara bersamaan. Namun, pola

¹⁰⁴ *Ibid.*

kerja sama ini menempatkan Kongo pada posisi sebagai pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah utama tetap dihasilkan di luar negeri, sehingga memperkuat ketergantungan teknologi dan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur di Republik Demokratik Kongo masih sering terhambat oleh praktik korupsi, lemahnya tata kelola, serta keterbatasan pendanaan. Meskipun organisasi non-pemerintah (LSM) dan pihak swasta telah berusaha membantu menutup kekurangan tersebut, upaya yang dilakukan belum merata di seluruh wilayah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang bergantung pada sumber air yang tidak layak dan sistem sanitasi yang seadanya. Selain itu, konflik yang terus berlangsung juga semakin menghambat proses pembangunan. Kondisi ini diperparah oleh ketidakstabilan politik, keterbatasan dana, serta kapasitas administrasi yang belum memadai, sehingga upaya perbaikan belum berjalan optimal dan masyarakat tetap berada dalam kondisi yang rentan.

2.4.3. Korupsi oleh pemerintah lokal Republik Demokratik Kongo

Situasi ekonomi dan teknologi Republik Demokratik Kongo tidak semata-mata disebabkan oleh konflik berkepanjangan, tetapi juga merupakan dampak dari praktik korupsi yang mengakar dalam pemerintahan domestik. Pada masa kepemimpinan Mobutu Sese Seko (1965-1997), praktik korupsi semakin meluas dan terstruktur. Pemerintahannya pada awalnya memposisikan diri sebagai rezim yang apolitis bahkan anti-politik, di mana istilah “politisi” memiliki konotasi negatif dan identik dengan perilaku koruptif.¹⁰⁵ Dalam upaya menguasai sumber

¹⁰⁵ Angleng Suryatmojo Panjirani, “*Transisi Demokrasi Di Republik Demokratik Kongo Pasca Keruntuhan Rezim Mobutu (1998-2006)*” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012).

pendapatan dari sumber daya alam nasional, Mobutu melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dan memaksa investor Eropa keluar dari Zaire. Namun, pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut kemudian diserahkan kepada kerabat dan rekan dekatnya, yang pada praktiknya justru melakukan penyelewengan dan penggelapan aset. Kebijakan ini semakin ditegaskan melalui program “Zairianisasi” pada periode 1973-1974, yakni nasionalisasi besar-besaran terhadap bisnis milik asing yang dialihkan kepada warga Zaire, tetapi dalam implementasinya turut memperparah praktik korupsi dan melemahkan fondasi ekonomi negara.

Keruntuhan ekonomi Zaire memaksa pemerintah meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengelola utang luar negeri yang tidak lagi mampu dibayar. Setelah auditor IMF menemukan korupsi besar dalam pengelolaan keuangan negara, Mobutu mencari dukungan alternatif dengan mengunjungi Tiongkok pada tahun 1974 dan mengadopsi simbol-simbol ideologis Maoisme. Pada periode 1973-1974, melalui kebijakan nasionalisasi dan “Zairianisasi”, bisnis-bisnis asing dialihkan kepada warga Zaire dan kemudian ditempatkan di bawah kendali negara. Namun, kebijakan tersebut justru memperparah kemerosotan ekonomi.¹⁰⁶ Pada tahun 1975, pemotongan gaji pegawai negeri sebesar 50% memicu upaya kudeta yang gagal. Dampak nasionalisasi semakin terasa pada 1977 ketika ekonomi mengalami penurunan tajam sehingga Mobutu kembali berupaya menarik investor asing. Ia tetap terpilih dalam pemilu satu kandidat pada 1977 dan

¹⁰⁶ BBC News, “*Democratic Republic of Congo Profile - Timeline*,” 2019, <https://www.bbc.com/news/world-africa-13286306>.

1984, sementara pada 1988 kekayaan pribadinya diperkirakan mencapai sedikitnya US\$50 juta, sebagian besar disimpan di bank-bank Swiss (meskipun hanya sekitar US\$3,4 juta yang dilaporkan ditemukan setelah ia digulingkan). Jumlah tersebut hampir setara dengan total utang luar negeri negara saat itu. Dalam pidatonya pada 20 Mei 1976 di Kinshasa di hadapan sekitar 70.000 orang, Mobutu bahkan secara terbuka menyinggung praktik korupsi kecil-kecilan. Pada 1989, pemerintah Zaire akhirnya gagal membayar pinjaman internasional dari Belgia.¹⁰⁷

Sementara itu, kemewahan pribadi Mobutu sangat kontras dengan kondisi rakyatnya. Infrastruktur nasional runtuh, banyak pegawai negeri tidak menerima gaji selama berbulan-bulan, dan inflasi yang tinggi mendorong budaya korupsi di kalangan birokrasi. Angkatan Bersenjata Zaire (FAZ) mengalami moral rendah akibat gaji tidak teratur dan kondisi hidup yang buruk, bahkan kerap memeras warga sipil melalui pos-pos pemeriksaan. Sebagian besar sumber daya negara tersentralisasi pada presiden, keluarganya, serta elite militer dan politik, sementara hanya Divisi Kepresidenan Khusus yang menerima pembayaran rutin. Mobutu dikenal dengan gaya hidup mewah, termasuk membangun istana di Gbadolite yang dijuluki “Versailles di hutan”, menyewa pesawat Concorde pada 1989 untuk perjalanan internasional, serta memiliki properti di Prancis. Rezimnya kemudian dikenal luas sebagai salah satu contoh kleptokrasi dan nepotisme paling mencolok di dunia, dengan kerabat dan anggota suku Ngbandi menempati posisi strategis. Ia bahkan menyiapkan putranya, Nyiwa, sebagai penerus sebelum meninggal pada 1994. Setelah memimpin selama 32 tahun, Mobutu meninggalkan warisan

¹⁰⁷ Angleng Suryatmojo Panjirani, *Loc. cit.*

otoritarianisme dan kemerosotan ekonomi, meskipun kekayaan pribadinya diperkirakan mencapai lebih dari US\$50 juta, diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam negara yang kaya sementara mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan.¹⁰⁸

Setelah Mobutu digulingkan, presiden selanjutnya yaitu Laurent-Désiré Kabila. Namun kabila terbunuh di tahun 2001 dan digantikan oleh anaknya yaitu Joseph Kabila (2001-2018). Pada masa pemerintahan Joseph Kabila, ia dilaporkan mengendalikan sebuah bank komersial swasta di Republik Demokratik Kongo melalui anggota keluarga serta sekutu politik terdekatnya. Jaringan tersebut diduga terlibat dalam berbagai praktik korupsi, termasuk penggelapan dana dari rekening milik lembaga pemerintah dan penerimaan suap. Dana yang diperoleh kemudian dialihkan melalui sejumlah rekening atas nama individu dan perusahaan swasta yang memiliki keterkaitan dengan jaringan tersebut.

BGFI Bank yang berkantor pusat di Gabon membuka anak perusahaan di Republik Demokratik Kongo (DRC) pada tahun 2010. Sejak awal pendiriannya, bank ini memiliki kedekatan dengan rezim yang sedang berkuasa. Secara kepemilikan, 60 persen saham BGFI Bank RDK dimiliki oleh perusahaan induknya, sedangkan 40 persen sisanya dimiliki oleh Gloria Mteyu, saudari Presiden Joseph Kabila. Selain itu, sejumlah orang dekat keluarga Kabila juga menduduki posisi strategis di dalam bank, seperti Pascal Kinduelo sebagai presiden dewan direksi dan Francis Selemani (saudara angkat Kabila) yang diangkat sebagai

¹⁰⁸ Thomas Bailey, “*Mobutu Sese Seko: The Rise and Fall of Congo’s Infamous Dictator*,” The Collector, 2024, <https://www.thecollector.com/mobutu-congo-great-dictator/>.

wakil direktur jenderal pada tahun 2012.¹⁰⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal bank tersebut berada di bawah pengaruh kuat lingkaran dalam kepresidenan. Meskipun secara formal beroperasi sebagai bank komersial yang menyediakan layanan perbankan ritel dan korporasi, dalam praktiknya BGFI Bank RDK diduga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengelola dan mengalihkan dana publik demi kepentingan pribadi. *BGFI Bank* (bank swasta di RDK) diduga menjadi perantara bagi Kabila dan keluarganya untuk mengalihkan lebih dari US\$ 125 juta. Kontrol yang dimiliki keluarga presiden memungkinkan terjadinya pemindahan dana dari rekening negara, transaksi dengan sumber dana yang meragukan, serta minimnya pengawasan terhadap aliran keuangan tersebut.

Salah satu aliran keuangan dari Perusahaan *Congo Construction Company* (CCC), yang berperan sebagai perusahaan perantara Tiongkok bagi perusahaan konstruksi milik negara Tiongkok. Melalui rekening di *BGFI Bank RDK*, CCC digunakan untuk menyalurkan dana kepada jaringan Kabila, terutama pada momen-momen penting dalam kesepakatan pertukaran mineral dengan proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar. Pada tahun 2016, bank koresponden internasional mulai mempertanyakan pembayaran rutin sebesar US\$100.000 dari *Congo Highway Management Corporation (CHMC)* kepada CCC.¹¹⁰ Dokumen pendukung berupa faktur yang diajukan untuk membenarkan transaksi tersebut justru mengandung sejumlah kejanggalan, seperti kesalahan tanggal, kesalahan ejaan, dan indikasi pemalsuan.

¹⁰⁹ John Dell'Osso et al., "*Inside The Congo Hold-Up How a Captured Bank Enabled Grand Corruption*," 2021. Hlm., 5.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm., 9.

Bank Sentral Kongo tercatat mentransfer dana sebesar US\$94,5 juta kepada entitas yang berhubungan dengan keluarga Kabila. Selain itu, puluhan juta dolar lainnya juga berasal dari lembaga publik, termasuk US\$20 juta dari perusahaan pertambangan milik negara, *Gécamines*, sebagaimana dilaporkan Mediapart. Mantan Gubernur Bank Sentral periode 2013 hingga awal tahun tersebut, Deogratias Mutombo, maupun pihak *Gécamines* tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan konsorsium investigasi. Catatan dalam *Congo Hold-Up* juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang sama menerima tambahan US\$72 juta dari sumber yang tidak diketahui melalui rekening BGFI di bank sentral.¹¹¹

Ironisnya, meskipun Kongo memiliki kekayaan mineral yang sangat besar, selama masa kepemimpinan Kabila pengeluaran tahunan pemerintah tidak pernah melampaui US\$5 miliar, angka yang relatif kecil untuk negara seluas Eropa Barat dengan populasi sekitar 100 juta jiwa. Pada tahun 2018, tahun terakhir pemerintahannya, anggaran untuk sektor kesehatan bahkan kurang dari US\$230 juta, berdasarkan data Kementerian Anggaran. Situasi ini semakin memperkuat kritik terhadap praktik pengelolaan keuangan negara, di mana Inspektur Jenderal Keuangan Kongo, Jules Alingete Key, menyebut BGFI sebagai “bank mafia”.¹¹²

Lebih lanjut, pada masa kepemimpinan presiden Felix Tshisekedi (2019-sekarang) terdapat upaya pemberantasan korupsi, terutama melalui penguatan peran Inspektorat Jenderal Keuangan (IGF) dalam mengaudit penggunaan anggaran

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Clowes and Kavanagh, “*Document Leak Shows Kabila Family, Associates Looted DRC Funds*,” 2021, <https://www.aljazeera.com/economy/2021/11/19/document-leak-shows-kabila-family-associates-looted-drc-funds>

negara. Namun, efektivitasnya masih diperdebatkan karena korupsi di Kongo bersifat sistemik dan telah mengakar sejak lama, termasuk sejak era Mobutu dan berlanjut pada masa Kabila. Hal ini disebabkan oleh jaringan politik era Kabila masih berpengaruh kuat dan transparansi dalam kontrak pertambangan dan pengelolaan pendapatan negara masih menghadapi kritik dari organisasi masyarakat sipil. Sehingga dengan masifnya korupsi yang terjadi di Kongo, membuat ekonomi dan teknologi Kongo masih lemah. Hal ini membuat Kongo sangat mengandalkan pendapatan melalui ekspor dan bantuan investasi dari pihak asing, salah satunya yang paling banyak memberikan investasi adalah Tiongkok. Dengan penawaran Tiongkok yaitu *resource for infrastructure* dalam perjanjian *Sicomines*, menjadikan Kongo bergantung terhadap pembiayaan dari Tiongkok untuk industri pertambangan dan memperbaiki infrastrukturnya pasca konflik dan korupsi besar-besaran.